

Pembentukan Model Pengakuan Sewa Yang Ideal Berdasarkan PSAK 73 Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan Jasa Transportasi di Indonesia

Duwi Rahayu¹, Imelda Dian Rahmawati², Aisha Hanif³

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo¹²³

duwirahayu@umsida.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 9 Maret 2022

Disetujui : 25 Maret 2022

Dipublikasi : 1 April 2022

ABSTRACT

The purpose of this study is to obtain information related to the formation of an ideal rental recognition model based on PSAK 73 to improve the financial performance of transportation service companies in Indonesia. This research is a qualitative research using a content analysis approach. The content analysis approach in this study uses secondary data and information from the financial statements of transportation service companies in Indonesia that present periodic financial reports on the Indonesia Stock Exchange in 2018, 2019, 2020 and the third quarter of 2021. Based on the availability of data, the sample of this research is 3. The transportation company with the largest number of shares outstanding on the Indonesian stock exchange is sourced from www.idx.co.id and has implemented PSAK 73 before and after January 1, 2020. The results of this study indicate the establishment of a rental recognition model for transportation companies in Indonesia based on PSAK 73 has been applied ideally implied in the company's statement of financial position. However, the implementation of PSAK 73 is not overall able to improve the financial performance of transportation service companies in Indonesia due to the reclassification of accounts into Right to Use Assets and Lease Liability which could potentially increase the company's total liabilities. This study shows that companies need to make policies to reduce risks related to the application of PSAK 73, especially for transportation service companies in Indonesia.

Keywords: Formation of the Ideal Lease Recognition Model, PSAK 73, Financial Performance, Indonesian Transportation Service Company

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang terutama dalam sektor industri yang terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dalam dunia bisnis. Dari pertumbuhan ekonomi tersebut didukung dengan adanya penambahan dari berbagai jumlah sektor industri yang menghadapi persaingan yang cukup ketat dan selektif dalam hal pelayanan secara optimal kepada para konsumen. Oleh karena itu, untuk memperoleh perhatian dari para konsumen, perusahaan memerlukan aset tetap (*fixed assets*) dalam menunjang kelancaran operasional perusahaan ([Mashuri dan Ermaya, 2021](#)) ([Safitri et al, 2019](#)).

Manfaat dari Aset tetap adalah untuk membantu kegiatan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa, yang bersumber dalam kegiatan penyewaan untuk kebutuhan administrasi dan bisa digunakan juga selama periode operasional perusahaan atau dalam jangka waktu lebih dari satu tahun sehingga mempunyai pengaruh dalam peningkatan profitabilitas perusahaan ([Oxtaviana dan Khusbandiyyah, 2016](#)) ([Safitri et al, 2019](#)).

Menurut [Mashuri dan Ermaya \(2021\)](#) Untuk mendapatkan manfaat aset tetap, banyak perusahaan diharuskan untuk menyediakan dana yang relatif besar. Sehingga perusahaan mencari alternatif lain untuk memperoleh aset tetap tersebut, salah satu alternatif dalam mendapatkan manfaat aset tetap bisa melalui perusahaan pembiayaan dalam bentuk sewa. Banyaknya kegiatan transaksi atas sewa, maka diperlukan suatu pedoman untuk menentukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengukuran atas sewa. Untuk itu pemerintah dan perusahaan-perusahaan di



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Indonesia berkolaborasi untuk menyepakati suatu aturan untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang memerlukan pengambilan keputusan dalam hal sewa. Menurut [Martani, et al \(2016\)](#) Kebutuhan informasi sangat penting bagi para pengguna laporan keuangan, terutama untuk mendapatkan informasi terkait kondisi masa lalu, saat ini dan dimasa yang akan datang suatu perusahaan.

Menurut [Ikatan Akuntan Indonesia \(2017\)](#) PSAK 73 mengakui sewa sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa kecuali masa sewa kurang dari 12 bulan dan aset pendasar bernilai rendah. PSAK 73 mengenai sewa akan menggantikan standar yang terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa yakni PSAK 30 mengenai sewa, ISAK 8 mengenai kriteria penentuan suatu perjanjian yang mengandung sewa, ISAK 23 terkait pertimbangan transaksi yang melibatkan suatu bentuk Legal sewa, dan ISAK 25 terkait Hak atas Tanah. PSAK 73 telah resmi berlaku pada tanggal 1 Januari 2020, dan IAI memberikan izin perusahaan untuk dapat mengimplementasikan lebih dini dengan ketentuan perusahaan tersebut telah menerapkan PSAK 72 terkait Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

[Mashuri dan Ermaya \(2021\)](#) menyatakan bahwa salah satu pengaruh implementasi PSAK 73 tersebut mempunyai dampak dalam hal pencatatan transaksi sewa dari sisi *lessee* (penyewa). Transaksi secara keseluruhan akan dicatat sebagai sewa pembiayaan sehingga transaksi yang muncul dalam kegiatan *lease* (sewa) akan diakui dan dicatat sebagai aset dan liabilitas di laporan keuangannya. Hambatan yang dapat terjadi dalam kegiatan sewa dengan mengimplementasikan PSAK 73 adalah pada perusahaan yang mempunyai banyak kantor cabang maupun anak perusahaan, dimana perusahaan induk harus dapat mengidentifikasi berbagai macam kontrak sewa yang ada di seluruh unit dan harus dianalisis isinya.

Kendala di atas dapat saja terjadi pada perusahaan-perusahaan yang terlisting di Bursa Efek Indonesia. Dimana perusahaan perlu mempertimbangkan opsi untuk membeli secara langsung atau menyewakan aset tersebut. Kapan memutuskan untuk membeli secara langsung, perusahaan akan memiliki hak pengelolaan penuh atas aset tersebut dan beberapa biaya yang timbul dari kepemilikan aset. Selain biaya tersebut, perusahaan juga harus menanggung biaya penyusutan dan pemeliharaan biaya, dan modal lebih untuk membeli aset tersebut. Sedangkan jika perusahaan memutuskan untuk mengadakan perjanjian sewa, maka perusahaan dapat menghemat modal yang digunakan untuk membeli aset, pembiayaan fleksibel, meminimalkan biaya pemeliharaan, dan menghilangkan keusungan aset ([Kieso et al., 2019](#)).

[Branswijck & Longueville \(2011\)](#) menyarankan bahwa rasio utang terhadap ekuitas, pengembalian aset, dan rasio lancar secara signifikan dipengaruhi oleh kapitalisasi sewa operasi. [Hagar & Djärv \(2015\)](#) menunjukkan bahwa semua perusahaan yang menggunakan sewa operasi sampai batas tertentu akan terpengaruh oleh amandemen, meskipun sebagian besar perusahaan *Mid and Small Cap* tidak akan memiliki dampak yang signifikan terhadap neraca perusahaan. [Idrus \(2016\)](#) menyatakan bahwa implementasi PSAK 30 belum mencapai tingkat kesesuaian 100% dengan adanya beberapa kriteria yang belum terpenuhi, indikator masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomi, 75% dari perkiraan umur ekonomis aset tetap sedangkan masa sewa yang diterapkan oleh perusahaan adalah 37,5% dari taksiran umur ekonomis aset. [Ozturk & Sercemeli \(2016\)](#) menyatakan bahwa dampak dari sewa operasi di laporan posisi keuangan akan menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam aset dan liabilitas pada perusahaan penerbangan di Turki.

[Ahilik \(2019\)](#) menyimpulkan bahwa PSAK 73 memperketat persyaratan sewa operasi dimana persyaratan sewa pembiayaan klasifikasi menjadi lebih mudah dimana persyaratan sewa operasi harus memenuhi semua kriteria, yaitu sewa aset jangka pendek (kurang dari atau sama dengan 12 bulan) dan bernilai rendah aktiva. Jika tidak memenuhi kedua kriteria tersebut, maka secara otomatis diakui sebagai sewa pembiayaan. [Safitri et, al. \(2019\)](#) menyimpulkan secara keseluruhan bahwa industri jasa mengalami dampak yang sangat signifikan peningkatan rata-rata rasio solvabilitas dan penurunan rata-rata yang sangat signifikan rasio profitabilitas, diikuti oleh industri pertambangan dan manufaktur.

[Sandi et al \(2020\)](#) menyimpulkan bahwa implementasi bersifat retrospektif yang memerlukan penyajian kembali sewa secara komparatif dalam keuangan 3 periode pernyataan dan harus mengidentifikasi kontrak, pengakuan awal, revaluasi dan pembayaran sewa, biaya perolehan sewa, jenis sewa, dan opsi perpanjangan sewa, yang mengakibatkan peningkatan aset dan kewajiban pada perusahaan. [Mashuri & Ermaya \(2021\)](#) mengemukakan bahwa dampak dari hasil kapitalisasi



leasing akan mengakibatkan perubahan material yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan posisi keuangan. [Rosyid & Firmansyah \(2021\)](#) tersirat bahwa Perusahaan akan lebih efektif dan efisien jika melakukan PSAK 73 lebih awal implementasi karena IFRS 16 telah diimplementasikan sejak tahun 2019.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian sebelumnya belum dapat menunjukkan lebih detail dampak dalam penerapan PSAK 73 adopsi dari IFRS 16 dalam laporan keuangan di atas sewa pada perusahaan di Indonesia dengan obyek penelitian adalah perusahaan Jasa Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa transportasi yang terdaftar di BEI. Karena perusahaan jasa transportasi merupakan perusahaan padat modal, dimana proses operasionalnya perusahaan sering kali menggunakan *leasing* dalam pengadaan barang modal agar tidak mengganggu arus kas.

Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis lebih lanjut bagaimana perubahan dari penerapan PSAK 73 mengenai sewa akan menunjukkan Pembentukan Model Pengakuan Sewa yang Ideal Berdasarkan PSAK 73 Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan Jasa Transportasi di Indonesia tahun 2018, 2019, 2020 dan Kuartal III Tahun 2021. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi tambahan secara *literature* mengenai implementasi PSAK 73 atas lease terhadap kinerja keuangan pada perusahaan khususnya perusahaan jasa transportasi.

STUDI LITERATUR

Penelitian Terdahulu

[Ozturk & Sercemeli \(2016\)](#) mengungkapkan bahwa akibat dari penerapan sewa operasi di laporan posisi keuangan akan memberikan dampak peningkatan yang signifikan dalam aset dan liabilitas pada mayoritas perusahaan penerbangan yang ada di Turki. [Hagar & Djärv \(2015\)](#) menyatakan bahwa seluruh perusahaan yang menerapkan sewa operasi sampai batas waktu yang ditetapkan akan dipengaruhi oleh amandemen, walaupun mayoritas perusahaan Mid and Small Cap tidak akan mempunyai akibat yang signifikan pada laporan posisi keuangan perusahaan. [Idrus \(2016\)](#) mengungkapkan bahwa penerapan PSAK 30 belum memenuhi standar 100% dengan adanya beberapa indikator yang belum terpenuhi, maka kriteria masa sewa adalah sebagian besar didasarkan pada umur ekonominya, 75% dari estimasi umur ekonomis aset tetap sedangkan jangka waktu sewa yang diimplementasikan oleh perusahaan adalah 37,5% dari taksiran umur ekonomis aset.

[Rosyid & Firmansyah \(2021\)](#) mengemukakan bahwa Perusahaan akan lebih efektif dan efisien apabila melaksanakan PSAK 73 lebih dini implementasi karena IFRS 16 telah diterapkan sejak tahun 2019. [Safitri et. al. \(2019\)](#) mengungkapkan mayoritas industri jasa mengalami dampak yang signifikan peningkatan rata-rata rasio solvabilitas dan adanya penurunan yang sangat signifikan jika dilihat dari rasio profitabilitas, kemudian diikuti oleh industri pertambangan dan manufaktur. [Ahalik \(2019\)](#) menyatakan bahwa PSAK 73 mewajibkan persyaratan sewa operasi antara lain persyaratan sewa pembiayaan menjadi lebih fleksibel dimana persyaratan sewa operasi harus sesuai dengan semua kriteria, yakni sewa jangka pendek (kurang dari atau sama dengan 12 bulan) dan aktiva bernilai rendah. Apabila belum sesuai kedua kriteria di atas, maka diakui sebagai sewa pembiayaan. [Sandi etc. \(2020\)](#) mengungkapkan bahwa penerapan bersifat retrospektif yang membutuhkan penyajian kembali sewa secara komparatif dalam keuangan 3 periode pernyataan dan wajib mengidentifikasi kontrak, pengakuan awal, revaluasi dan pembayaran sewa, biaya perolehan sewa, jenis sewa, dan opsi perpanjangan sewa, yang mengakibatkan peningkatan aset dan kewajiban pada perusahaan. [Mashuri & Ermaya \(2021\)](#) menyatakan bahwa dampak dari hasil kapitalisasi leasing akan berdampak pada perubahan material yang dilaporkan dalam laporan keuangan yakni laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta laporan posisi keuangan.

Sewa

Sewa adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan kepada lessee hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset untuk jangka waktu yang disepakati dan sebagai imbalannya, penyewa melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada penyewa. ([Martani Dwi, 2018](#)). Keuntungan dari leasing adalah 100% dibiayai dengan tingkat bunga tetap dan sewa sering ditandatangani tanpa memerlukan uang muka dari



penyewa (Kieso et al., 2017). Keuntungan lain dari leasing adalah pembayaran sewa dibuat tetap, sehingga melindungi penyewa terhadap inflasi dan kenaikan biaya uang, ada perlindungan terhadap keusangan, fleksibilitas, perjanjian sewa cenderung kurang ketat, perusahaan tidak melaporkan aset dan kewajiban sewa. Sewa dibagi menjadi 2 kategori, yaitu (1) Sewa operasi, yaitu sewa jangka pendek dan tidak ada pengalihan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset lessor kepada: penyewa. (2) Sewa pembiayaan, adalah sewa yang mengakibatkan pengalihan secara substansial seluruh manfaat dan risiko terkait dengan kepemilikan aset lessor kepada lessee sehingga sewa operasi disajikan di luar neraca ([Bintaro Yudho, 2020](#)) ([Susiani, R. et al, 2021](#)).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 73 tentang Sewa

PSAK 73 adalah standar akuntansi keuangan yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2017 yang merupakan adopsi dari IFRS 16 Sewa yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020, namun penerapan dini hanya diperbolehkan jika menerapkan PSAK72: pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 73 menggantikan PSAK 30: Sewa, ISAK 8: Menentukan apakah suatu perjanjian mengandung sewa, ISAK 23: Sewa insentif operasi, ISAK 24: Evaluasi substansi transaksi yang melibatkan hukum bentuk sewa, dan ISAK 25: Hak atas tanah. PSAK 73 mengubah secara substansial akuntansi untuk lessee dan hampir semua sewa diperlakukan sebagai sewa pembiayaan. Ini karena konsep sebelumnya dipertimbangkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan karena tidak selalu menunjukkan keakuratan transaksi sewa dalam hal penyewa tidak diharuskan untuk mengakui aset dan kewajiban yang timbul dari sewa operasi. ([IAI, 2017](#)).

Tujuan PSAK 73 adalah untuk menetapkan prinsip-prinsip untuk mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal, terutama untuk penyewa. Penyewa adalah disyaratkan untuk mengakui Aset Hak Guna dan liabilitas sewa, kecuali jika sewa jangka pendek memiliki: masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa aset bernilai rendah tanpa memperhatikan: materialitas, ketika aset baru adalah material penilaian aset baru, jika aset tersebut disewakan maka tidak memenuhi aset bernilai rendah seperti laptop, HP. Dan furnitur ([Susiani, R. et al, 2021](#)).

Identifikasi dari Sewa

Menurut [IAI \(2017\)](#) Kontrak merupakan atau mengandung sewa jika memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan asset identifikasi selama jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

1. Suatu kontrak mengandung, sewa apabila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan asset identifikasi selama 12 bulan untuk dipertukarkan dengan imbalan.
2. Jangka waktu dapat dideskripsikan sebagai jumlah penggunaan asset identifikasi misal unit produksi.
3. Entitas menilai kembali kontrak jika syarat dan ketentuan kontrak berubah
4. Aset Identifikasi meliputi;
 - a. Ditetapkan secara eksplisit atau secara implisit
 - b. Pemasok (supplier tidak memiliki hak substitusi substantive)
 - c. Bagian kapasitas aset secara fisik dapat dibedakan
 - d. Penyewa secara substantial mendapat manfaat ekonomik dari penggunaan asset
 - e. Penyewa mengarahkan penggunaan asset
 - f. Kontrak mengandung sewa

Memisahkan Komponen Sewa;

- a. Untuk kontrak yang merupakan, atau mengandung, sewa, entitas mencatat masing-



masing komponen sewa dalam kontrak sebagai sewa secara terpisah dari komponen non sewa dari kontrak, kecuali cara praktis.

- b. Pedoman cara pemisahan komponen kontrak

Pengakuan dan Pengukuran Nilai Sewa

Menurut [IAI \(2017\)](#) PSAK 73 Memberikan ketentuan dalam prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan metode akuntansi tunggal khusus bagi penyewa, sedangkan yang menjadi aturan utama PSAK 73 antara lain;

1. Penyewa diisyaratkan untuk melakukan pengakuan aset hak-guna (*right of use assets*) dan liabilitas sewa. Kecuali:
 - a. Sewa jangka pendek
 - b. Sewa yang aset pendasarnya (*underlying assets*) bernilai rendah
2. Pesewa melakukan klasifikasi sewanya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda.

Aset Hak Guna

Menurut [IAI \(2017\)](#) Perusahaan mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah liabilitas sewa ditambah dengan pembayaran sewa dibayar dimuka ditambah biaya langsung awal ditambah estimasi biaya pembongkaran dan restorasi dikurangi insentif sewa. Aset hak-guna selanjutnya disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dari tanggal dimulainya sewa hingga akhir masa manfaat aset hak-guna yang lebih awal atau akhir masa sewa. Estimasi masa manfaat aset hak-guna berkurang secara berkala oleh setiap kerugian penurunan nilai, jika ada, dan disesuaikan untuk pengukuran kembali liabilitas sewa.

Liabilitas Sewa

Menurut [IAI \(2017\)](#) Liabilitas sewa pada awalnya diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan ditambah nilai kini pembayaran ekspektasian pada akhir sewa. Kemudian di diskontokan menggunakan tingkat bunga implisit dalam sewa atau, jika tingkat bunga tidak dapat ditentukan, tingkat pinjaman tambahan perusahaan. Umumnya perusahaan menggunakan tingkat bunga pinjaman tambahan sebagai tingkat diskonto. Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode bunga efektif.

Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari: perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Perusahaan atas jumlah tersebut diharapkan akan dibayar dalam jaminan nilai sisa, atau jika Perusahaan mengubah penilaian atas apakah akan melakukan panggilan, pembaruan atau penghentian. Ketika kewajiban sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna atau dicatat dalam laba atau rugi jika nilai tercatat aset hak-guna telah diturunkan menjadi nol.

Kinerja Keuangan Perusahaan

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. keuangan ini Kinerja merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan. Akuntansi digunakan untuk menghasilkan informasi berupa laporan keuangan pernyataan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Salah satu keputusan tersebut adalah penilaian kinerja perusahaan, dan salah satu aspek penilaian kinerja perusahaan adalah rasio



keuangan. ([Safitri et al, 2019](#)).

Analisis rasio keuangan dilakukan dengan membandingkan data kuantitatif yang diperoleh dari keuangan laporan, baik dari Laporan Posisi Keuangan maupun Laporan Laba Rugi ([Hartono dan Dwajoto, 2018](#)) Ada enam jenis rasio keuangan, antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio pertumbuhan, dan rasio penilaian. Penelitian ini menggunakan rasio solvabilitas Equity dan rasio profitabilitas. Penggunaan rasio ini karena berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, rasio keuangan berdampak perubahan akibat penerapan PSAK 73 sewa.

Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Rasio ini dapat dihitung menggunakan Debt to Asset (DAR) yang dihitung dengan membandingkan total hutang dengan total aset ([Rosyid, 2017](#)). Semakin tinggi *Debt to Asset*, semakin besar dana atau modal pinjaman dari pihak luar yang digunakan sebagai investasi dalam bentuk pembiayaan pada aktiva guna menghasilkan laba bagi perusahaan, semakin sedikit DAR maka semakin sedikit hutang yang digunakan perusahaan untuk memperoleh asset, dan rasio DAR yang sehat atau baik jika lebih kecil dari 1 x atau < 100% ([Rina, 2019](#)).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati ([Moleong, 2006](#)). Menurut [Sekaran dan Bougie \(2017:130\)](#) sumber data dapat diperoleh dari sumber sekunder. Data sekunder (*secondary data*) adalah data mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada. Data yang digunakan adalah data sekunder dalam laporan keuangan perusahaan pernyataan di sub sektor jasa transportasi tahun 2018, 2019, 2020 dan kuartal III Tahun 2021 bersumber dari www.idx.co.id.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi. Menurut [Hsieh & Shannon \(2005\)](#), analisis isi merupakan teknik penelitian kualitatif untuk menafsirkan makna dari data teks. Pendekatan analisis isi dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan informasi dari laporan keuangan perusahaan jasa transportasi di Indonesia yang menyajikan laporan keuangan secara berkala di Bursa Efek Indonesia tahun 2018, 2019, 2020 dan Kuartal III 2021. Berdasarkan ketersediaan data, maka sampel penelitian ini adalah 3 perusahaan transportasi yang dengan jumlah saham terbesar yang beredar di bursa efek Indonesia dan telah menerapkan PSAK 73 sebelum maupun sesudah tanggal 1 Januari 2020. Alasannya karena unsur jumlah saham yang beredar di pasar modal akan menunjukkan kondisi emiten penerbit saham ([Erlinawati dan Mawardi, 2015](#)). Pada perusahaan yang mempunyai jumlah saham terbesar yang beredar maka akan diikuti dengan jumlah kantor cabang maupun anak perusahaan dengan jumlah besar pula, dimana perusahaan induk harus dapat mengidentifikasi berbagai macam kontrak sewa yang ada di seluruh unit dan harus dianalisis isinya. Sehingga perusahaan dengan jumlah saham terbesar yang beredar tersebut sangat relevan jika dijadikan obyek penelitian dalam pembentukan model pengakuan sewa yang ideal berdasarkan PSAK 73.

HASIL

Pembentukan Model Pengakuan Sewa yang Ideal Berdasarkan PSAK 73 Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan dalam Penyajian Laporan Posisi Keuangan Perusahaan melalui Analisis Isi Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penerapan



PSAK 73

PSAK 73 merupakan standar akuntansi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sewa guna usaha. PSAK 73 menggantikan PSAK 30 yang sebelumnya dianggap tidak dapat menyajikan transaksi sewa perusahaan dengan lengkap dan baik. Perubahan standar akuntansi sewa ini juga berdampak dalam penyajian laporan posisi keuangan perusahaan karena PSAK 73 mewajibkan lessee untuk melakukan pengakuan aset hak-guna, yang akan berpengaruh terhadap nilai item aset, dan mengakui liabilitas sewa yang akan berdampak pada nilai aset. item aset-kewajiban. Pengaruh pada pos aset dan liabilitas juga akan mempengaruhi laporan posisi keuangan perusahaan. Sehingga diperlukan pembentukan model pengakuan sewa yang ideal berdasarkan PSAK 73 untuk meningkatkan kinerja keuangan dalam penyajian Laporan Posisi Keuangan Perusahaan. Berikut pembentukan model pengakuan sewa yang ideal berdasarkan PSAK 73 dalam penyajian laporan posisi keuangan melalui Analisis Isi perbandingan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 :

1. PT. Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA)

Mulai tanggal 1 Januari 2019, Grup telah menerapkan dini PSAK 73 Sewa, menggunakan restropektif modifikasi. Penerapan standar akuntansi ini berpengaruh signifikan terhadap Aset dan Liabilitas Laporan Keuangan Tahunan 2018, 2019, 2020 dan Kuartal III tahun 2021. Berikut tabel 1 perbandingan laporan posisi keuangan sebelum dan sesudah penerapan:

Tabel 1
Perbandingan Laporan Posisi Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan
PSAK 73 PT. Berlian Laju Tanker Tbk

Laporan Posisi Keuangan (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat)	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 (Sebelum)	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 (Sesudah)	Increase (Decrease) %	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 (Sesudah)	Untuk tahun yang berakhir Kuartal III 2021 (Sesudah)	Increase (Decrease) %
Current Asset	7.910.239	5.220.693	-34,00%	6.391.894	8.450.462	11,83%
Non-Current Asset	63.438.294	62.191.936	-1,96%	59.681.199	60.018.816	21,56%
Total Aset	71.348.533	67.412.629	-5,52%	66.073.093	68.469.278	19,60%
Current Liabilities	12.833.718	9.568.042	-25,45%	12.633.148	9.775.780	23,71%
Non-Current Liabilities	29.546.979	27.192.145	-7,97%	25.524.993	26.270.583	67,41%
Total Liabilities	42.380.697	36.760.187	-13,26%	38.158.141	36.046.363	40,26%
Total Equity	28.967.836	30.652.442	5,82%	27.914.952	32.422.915	3,68%
Total Liabilities danEquity	71.348.533	67.412.629	-5,52%	66.073.093	68.469.278	19,60%

(Sumber: Laporan Keuangan BLTA, 2018 - Kuartal III 2021)

Dari tabel 1 di atas perbandingan laporan posisi keuangan tahun 2020 dan kuartal III tahun 2021 terjadi kenaikan total asset dan liabilitas masing-masing 19,60% dan 40,26%. Sedangkan tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan total aset dan liabilitas masing-masing sebesar -5,52% dan -13,26%. Penurunan Total Aset tersebut disebabkan beberapa hal salah satunya adalah terjadinya penurunan kas, bank, piutang usaha dan adanya penjualan 2 kapal tanker kimia grup. Penurunan total aset didominasi oleh penurunan aset lancar dan mengakui akun baru yaitu aset hak guna. Hal yang sama juga terjadi pada pos-pos liabilitas, sehingga DAR pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing 0,59 kali dan 0,54% disebabkan karena adanya pelunasan seluruh pinjaman di Bank Mandiri, dengan tujuan untuk memperbaiki laporan posisi keuangan dan arus kas di masa mendatang. Penurunan liabilitas didominasi liabilitas lancar



dan diikuti liabilitas jangka panjang akibat pengakuan akun baru, yaitu akun liabilitas sewa. Rincian pengakuan aset hak pakai dan kewajiban sewa dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan akun aset hak-guna dan liabilitas sewa Sebelum dan Setelah Penerapan PSAK 73 Pada PT. Berlian Laju Tanker Tbk

Laporan Posisi Keuangan (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat)	Sesudah Penerapan PSAK 73 31 Desember 2018	Setelah Penerapan PSAK 73 31 Desember 2019
Aset Hak Guna Bangunan	0	947.228
Liabilities Sewa		
Liabilitas yang jatuh tempo dalam 1 tahun	0	1.026.487
Jangka Panjang	0	530.404
Total Liabilitas Sewa	0	1.556.891

(Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BLTA 2019)

Penerapan PSAK 73 berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan PT. Berlian Laju Tanker Tbk. Hal ini terlihat dari peningkatan hak pakai aset dan kewajiban sewa. Aset hak guna perusahaan setelah PSAK 73 meningkat sebesar \$ 947.228, dan kewajiban sewa guna usaha meningkat sebesar \$ 1.556.891. Perbedaan nilai akun aset hak-guna dan akun liabilitas sewa adalah karena aset hak guna diukur sebesar biaya perolehan, dikurangi akumulasi amortisasi dan kerugian penurunan nilai ($1.410.794 - 463.566 = 947.228$), dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna termasuk jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang terjadi, biaya pemulihan, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi insentif sewa yang diterima.

2. PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA)

Berdasarkan data laporan keuangan tahunan 2018, 2019, 2020 dan Kuartal III tahun 2021 yang diterbitkan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, terdapat perubahan standar penerapan PSAK 73. Perusahaan masih mempelajari PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2019. Penerapan standar akuntansi ini berpengaruh signifikan terhadap Aset dan Liabilitas Laporan Keuangan Tahunan 2018, 2019, 2020 dan Kuartal III tahun 2021. Berikut tabel 3 perbandingan laporan posisi keuangan sebelum dan sesudah penerapan;

Tabel 3
**Perbandingan Laporan Posisi Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan
PSAK 73 PT. Garuda Indonesia Tbk**

Laporan Posisi Keuangan (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat)	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 (Sebelum)	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 (Sebelum)	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 (Sesudah)	Increase (Decrease) %	Untuk tahun yang berakhir Kuartal III 2021 (Sesudah)	Increase (Decreas e) %
Current Asset	1.079.945.126	1.133.892.533	536.547.176	-52,68%	363.037.417	-32,34%
Non-Current Asset	3.075.529.677	3.321.783.241	10.253.433.231	208,67%	9.058.517.018	-11,65%
Total Aset	4.155.474.803	4.455.675.774	10.789.980.407	142,16%	9.421.554.435	-12,68%
Current Liabilities	3.061.396.001	3.257.836.267	4.294.797.755	31,83%	5.287.113.081	23,11%
Non-Current Liabilities	454.272.246	477.216.616	8.438.206.899	1668,21%	7.739.914.688	-8%



Total Liabilities	3.515.668.247	3.735.052.883	12.733.004.654	240,91%	13.027.027.768	2,31%
Total Equity	639.806.556	720.622.891	(1.943.024.247)	-369,63%	(3.605.473.334)	85,56%
Total Liabilities dan Equity	4.155.474.803	4.455.675.774	10.789.980.407	142,16%	9.421.554.435	-12,68%

(Sumber: Laporan Keuangan GIAA, 2018 - Kuartal III 2021)

Dari tabel di atas penyajian data laporan posisi keuangan tahun 2018 dan 2019 total asset dan liabilitas PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk rata-rata hampir sama, meskipun ada kenaikan akan tetapi tidak signifikan karena di tahun tersebut belum menerapkan PSAK 73. Berbeda ditahun 2020 dan kuartal III tahun 2021 total asset dan liabilitas perusahaan justru mengalami penurunan masing-masing sebesar -12,68% dan 2,31%, hal tersebut karena periode penyajian laporan posisi keuangan di tahun 2021 masih dalam periode kuartal III. Sedangkan di tahun 2019 dan tahun 2020 (sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73) terjadi kenaikan total asset dan liabilitas secara signifikan karena sudah adanya penerapan PSAK 73 masing-masing sebesar 142,16% dan 240,91%. Peningkatan total aset tersebut disebabkan oleh penerapan PSAK 73 yakni adanya beberapa reklasifikasi akun yang dilakukan oleh perusahaan, salah satunya adalah reklasifikasi sewa dibayar di muka atas pesawat, mesin, bangunan dan kendaraan. Reklasifikasi tersebut diakui menjadi akun baru yaitu aset hak guna. Kenaikan total aset didominasi oleh peningkatan aset tidak lancar. Hal yang sama juga terjadi pada pos-pos liabilitas, sehingga DAR pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing 0,83 kali dan 1,18 kali disebabkan karena penerapan PSAK 73. Kenaikan liabilitas didominasi liabilitas tidak lancar dan diikuti liabilitas lancar akibat pengakuan akun baru, yaitu akun liabilitas sewa. Rincian pengakuan aset hak pakai dan kewajiban sewa dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan akun aset hak-guna dan liabilitas sewa Sebelum dan Setelah Penerapan PSAK 73 Pada PT. Berlian Laju Tanker Tbk

Laporan Posisi Keuangan (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat)	Sesudah Penerapan PSAK 73 31 Desember 2019	Setelah Penerapan PSAK 73 31 Desember 2020
Aset Hak Guna		4.650.460.850
Rangka Pesawat	0	20.634.457
Mesin	0	5.829.858
Kendaraan	0	2.418.161
Perlengkapan dan Peralatan	0	1.898.000
Perangkat Keras	0	29.210.209
Tanah	0	12.045.074
Bangunan	0	
Total Aset Hak Guna		4.725.496.609
Liabilities Sewa	0	
Jangka Panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun		1.505.258.580
Jangka Panjang		4.493.564.698
Total Liabilitas Sewa		5.998.823.278

(Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BLTA 2019)

Penerapan PSAK 73 berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan PT. Berlian Laju Tanker Tbk. Hal ini terlihat dari peningkatan hak pakai aset dan kewajiban sewa. Aset hak guna perusahaan setelah PSAK 73 meningkat sebesar \$ 4.725.496.609, dan kewajiban sewa guna usaha meningkat sebesar \$ 1.556.891. Perbedaan nilai akun aset hak-guna dan akun liabilitas sewa adalah karena aset hak guna diukur sebesar biaya perolehan, dikurangi akumulasi amortisasi dan kerugian penurunan nilai $(5.508.272.167 - 782.775.558) =$



4.725.496.609) jumlah tersebut belum dikurangi kerugian penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna termasuk jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang terjadi, biaya pemulihan, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi insentif sewa yang diterima.

3. PT. Air Asia Indonesia Tbk (CMPP)

Berdasarkan data laporan keuangan tahunan 2018, 2019, 2020 dan Kuartal III tahun 2021 yang diterbitkan oleh PT. Air Asia Indonesia Tbk, terdapat perubahan standar penerapan PSAK 73. Perusahaan masih mempelajari PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2019, seluruh PSAK baru dan amandemen PSAK efektif per 1 Januari 2020. Penerapan standar akuntansi ini berpengaruh akan tetapi tidak terlalu signifikan terhadap Aset dan Liabilitas Laporan Keuangan Tahunan 2018, 2019, 2020 dan Kuartal III tahun 2021. Berikut tabel 5 perbandingan laporan posisi keuangan sebelum dan sesudah penerapan;

Tabel 5
Perbandingan Laporan Posisi Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 73
PT. AirAsia Indonesia Tbk

Laporan Posisi Keuangan (Disajikan dalam Rupiah)	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 (Sebelum)	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 (Sebelum)	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 (Sesudah)	Increase (Decrease) %	Untuk tahun yang berakhir Kuartal III 2021 (Sesudah)	Increase (Decrease) %
Current Asset	459.842.437.838	945.905.221.392	172.660.668.664	-81,75%	171.118.290.665	-0,89%
Non-Current Asset	2.385.202.774,515	1.667.164.853,540	5.907.855.417,088	254,37%	5.166.454.345,875	-12,55%
Total Aset	2.845.045.212,353	2.613.070.074,932	6.080.516.085,752	132,70%	5.337.572.636,540	-12,22%
Current Liabilities	2.806.387.704,648	2.007.253.622,193	4.957.130.972,939	146,96%	6.182.670.600,664	24,72%
Non-Current Liabilities	840.832.867,059	403.689.193,414	4.033.796.913,178	899,23%	3.681.527.754,251	-8,73%
Total Liabilities	3.647.220.571,707	2.410.942.815,607	8.990.927.886,117	272,92%	9.864.198.354,915	9,71%
Total Equity	- 802.175.359,354	202.127.259,325	- 2.910.411.800,365	- 1539,89%	- 4.526.355.718,375	55,52%
Total Liabilities danEquity	2.845.045.212,353	2.613.070.074,932	6.080.516.085,752	132,70%	5.337.842,636,540	-12,21%

(Sumber: Laporan Keuangan CMPP, 2018 - Kuartal III 2021)

Dari tabel di atas penyajian data laporan posisi keuangan tahun 2018 dan 2019 total asset dan liabilitas PT. AirAsia Indonesia Tbk rata-rata hampir sama, meskipun ada kenaikan akan tetapi tidak signifikan karena di tahun tersebut belum menerapkan PSAK 73. Berbeda ditahun 2020 dan kuartal III tahun 2021 total asset perusahaan justru mengalami penurunan sebesar -12,22% dan kenaikan total liabilitas 9,71%, hal tersebut karena periode penyajian laporan posisi keuangan di tahun 2021 masih dalam periode kuartal III. Sedangkan di tahun 2019 dan tahun 2020 (sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73) terjadi juga kenaikan total asset dan liabilitas akan tetapi tidak signifikan masing-masing sebesar 132,70% dan 272,92%. Kenaikan total aset tersebut disebabkan oleh penerapan PSAK 73 yakni adanya beberapa reklassifikasi akun yang dilakukan oleh perusahaan, salah satunya adalah reklassifikasi pesawat,



reklasifikasi tersebut diakui menjadi akun baru yaitu aset hak guna. Kenaikan total aset didominasi oleh peningkatan aset tidak lancar. Hal yang sama juga terjadi pada pos-pos liabilitas, sehingga DAR pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing 0,92 kali dan 1,47 kali disebabkan karena penerapan PSAK 73. Kenaikan liabilitas didominasi liabilitas lancar dan diikuti liabilitas tidak lancar akibat pengakuan akun baru, yaitu akun liabilitas sewa. Rincian pengakuan aset hak pakai dan kewajiban sewa dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan akun aset hak-guna dan liabilitas sewa Sebelum dan Setelah Penerapan PSAK 73 Pada PT. AirAsia Indonesia Tbk

Laporan Posisi Keuangan (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat)	Sesudah Penerapan PSAK 73 31 Desember 2019	Setelah Penerapan PSAK 73 31 Desember 2020
Aset Hak Guna Pesawat dan Mesin Pesawat	0	4.506.867.160.958
Liabilities Sewa		
Jangka Panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun	0	1.388.847.155.839
Jangka Panjang	0	3.804.324.636.476
Total Liabilitas Sewa	0	5.193.171.792.315

(Sumber: Laporan Keuangan Tahunan CMPP 2020)

Penerapan PSAK 73 berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan PT. AirAsia Indonesia Tbk. Hal ini terlihat dari peningkatan hak pakai aset dan kewajiban sewa. Aset hak guna perusahaan setelah PSAK 73 meningkat sebesar Rp. 4.506.867.160.958, dan liabilitas sewa meningkat sebesar Rp. 5.193.171.792.315,-. Perbedaan nilai akun aset hak-guna dan akun liabilitas sewa adalah karena aset hak guna diukur sebesar biaya perolehan, dikurangi akumulasi amortisasi dan kerugian penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna termasuk jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang terjadi, biaya pemulihan, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi insentif sewa yang diterima.

PEMBAHASAN

Pembentukan Model Pengakuan Sewa PSAK 73 pada PT. Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan dalam Penyajian Laporan Posisi Keuangan Perusahaan

Dalam hal pembentukan model pengakuan sewa PSAK 73 pada PT. Berlian Laju Tanker Tbk sudah ideal, hal tersebut sesuai dengan data perbandingan laporan posisi keuangan mulai tahun 2018, 2019, 2020 dan Kuartal III tahun 2021 yang diterbitkan oleh PT. Berlian Laju Tanker Tbk, terdapat perubahan standar penerapan PSAK 73 dimana group telah menerapkan PSAK 73 secara dini. Perusahaan yang melakukan perubahan standar akan mengakibatkan perubahan material yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan posisi keuangan ([Mashuri & Ermaya, 2021](#)).

Implementasi PSAK 73 dimulai dengan PT. Berlian Laju Tanker Tbk melakukan evaluasi pada awal kontak apakah sebuah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Jika kontrak menyatakan adanya hak untuk mengendalikan penggunaan dari aset yang diidentifikasi untuk sebuah jangka waktu (kurang dari atau sama dengan 12 bulan) dengan imbalan yang dipertimbangkan. PT. Berlian Laju Tanker Tbk sebagai *lessee*, grup menerapkan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset



yang bernilai rendah.

PT. Berlian Laju Tanker Tbk mengakui liabilitas sewa akan pembayaran sewa dan aset hak guna untuk mewakili hak untuk menggunakan manfaat aset. PT. Berlian Laju Tanker Tbk sebagai *lessor*, Sewa dalam PT. Berlian Laju Tanker Tbk tidak mentransfer secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam jumlah tercatat aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Hal tersebut sejalan dengan penelitian [Sandi etc. \(2020\)](#) menyimpulkan bahwa implementasi bersifat retrospektif yang memerlukan penyajian kembali sewa secara komparatif dalam keuangan 3 periode pernyataan dan harus mengidentifikasi kontrak, pengakuan awal, revaluasi dan pembayaran sewa, biaya perolehan sewa, jenis sewa, dan opsi perpanjangan sewa, yang mengakibatkan peningkatan aset dan kewajiban pada perusahaan. [Rosyid & Firmansyah \(2021\)](#) mengungkapkan bahwa Perusahaan akan lebih efektif dan efisien jika melakukan PSAK 73 lebih awal implementasi karena IFRS 16 telah diterapkannya sejak tahun 2019.

Sedangkan disisi kinerja keuangan PT. Berlian Laju Tanker Tbk cenderung meningkat jika dilihat dari Rasio Solvabilitas yakni DAR ditahun 2018, 2019, 2020 dan kuartal III tahun 2021 dengan jumlah masing-masing 0,59 kali, 0,54% kali, 0,57 kali, 0,52 kali. Semakin sedikit DAR maka semakin sedikit liabilitas yang digunakan perusahaan untuk memperoleh asset, dan rasio DAR yang sehat atau baik jika lebih kecil dari 1 x atau <100%. Maka dapat disimpulkan kinerja keuangan PT. Berlian Laju Tanker Tbk mengalami peningkatan setelah menerapkan PSAK 73.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan [Safitri et. al. \(2019\), Zhayyan \(2020\)](#) yang menyatakan bahwa mayoritas industri jasa mengalami dampak yang sangat signifikan peningkatan rata-rata rasio solvabilitas dan penurunan rata-rata yang sangat signifikan rasio profitabilitas, diikuti oleh industri pertambangan dan manufaktur.

Pembentukan Model Pengakuan Sewa PSAK 73 pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan dalam Penyajian Laporan Posisi Keuangan Perusahaan

Berdasarkan Pembentukan model pengakuan sewa PSAK 73 pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk sudah bisa dikatakan ideal, hal tersebut merujuk pada data perbandingan laporan posisi keuangan mulai tahun 2018 hingga Kuartal III tahun 2021 yang dipublish oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yang menunjukkan adanya perubahan standar implementasi PSAK 73. Pada tanggal dimulainya suatu kontrak, PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk melakukan penilaian apakah kontrak mengandung sewa atau tidak. Suatu kontrak dianggap berisi transaksi sewa jika kontrak tersebut memyerahkan hak untuk melakukan pengendalian penggunaan aset identifikasi selama 12 bulan atau kurang dari 12 bulan. PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai *lessor*, Maka PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan. Dalam sewa pembiayaan, jumlah terutang oleh lessee diakui sebagai piutang sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Pengakuan pendapatan sewa pembiayaan didistribusikan pada periode akuntansi yang menunjukkan suatu tingkat imbal hasil periodik yang konsisten atas investasi bersih lessor. Pendapatan sewa dari sewa operasi dapat diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama periode sewa. Biaya langsung awal dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa



operasi dimasukkan dalam total tercatat asset sewaan dan dilakukan pengakuan dengan dasar garis lurus selama periode sewa. PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai *lessee*, Aset yang didapatkan melalui sewa dilakukan pengakuan sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa. Pada tanggal awal, lessee mengukur aset hak guna terhadap biaya perolehan antara lain total pengukuran awal liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilaksanakan pada atau sebelum tanggal awal dikurangi dengan insentif yang didapatkan, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh *lessee*, dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh lessee dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar serta biaya restorasi.

Berbeda dengan penelitian [Sugiarto dan Dinarjito \(2022\)](#) yang menyatakan bahwa PT. XYZ telah mengikuti PSAK 73 sepenuhnya pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi sewa. Namun, untuk pengungkapan, perusahaan belum memberikan informasi yang lengkap sesuai dengan PSAK 73. PSAK 73 menetapkan kewajiban terkait kriteria sewa operasi dan kriteria sewa pembiayaan klasifikasi yang menjadi lebih mudah dimana persyaratan sewa operasi harus memenuhi semua kriteria, yaitu sewa asset jangka pendek (kurang dari atau sama dengan 12 bulan) dan bernilai rendah aktiva. Jika tidak memenuhi kedua kriteria tersebut, maka secara otomatis diakui sebagai sewa pembiayaan ([Ahalik, 2019](#)).

Sedangkan disisi kinerja keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengalami penurunan jika dilihat dari Rasio Solvabilitas yakni DAR ditahun 2018 hingga kuartal III tahun 2021 dengan jumlah masing-masing 0,84 kali, 0,83 kali, 1,18 kali, 1,38 kali. Semakin sedikit DAR maka semakin sedikit hutang yang digunakan perusahaan untuk memperoleh asset, dan rasio DAR yang sehat atau baik jika lebih kecil dari 1 x atau $<100\%$. Maka dapat disimpulkan kinerja keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengalami penurunan setelah menerapkan PSAK 73.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan [Zhayyan \(2020\)](#) menyatakan bahwa apabila perusahaan pada industri jasa penerbangan mengimplementasikan metode retrospektif pada PSAK 73, maka aset dan liabilitas akan terjadi peningkatan. Berbeda dengan ekuitas yang akan menurun, akan tetapi, apabila aset hak-guna diakui sebesar nilai liabilitas, maka nilai aset dan liabilitas akan mengalami peningkatan dan tidak mengalami perubahan. Penerapan Opsi A PSAK 73 pada rasio keuangan industri penerbangan menyebabkan penurunan performa DER 819%, DAR 21%, ROA 49%, dan peningkatan performa ROE 405%. Jika industri penerbangan memanfaatkan Opsi B, maka akan mengalami penurunan performa pada bagian DER, DAR, dan ROA masingmasing 136%, 10%, dan 53%. [Ozturk & Sercemeli \(2016\)](#) menyatakan bahwa dampak dari sewa operasi di laporan posisi keuangan akan menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam aset dan liabilitas pada perusahaan penerbangan di Turki.

Pembentukan Model Pengakuan Sewa PSAK 73 pada PT. AirAsia Indonesia Tbk (CMPP) Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan dalam Penyajian Laporan Posisi Keuangan Perusahaan

Pembentukan model pengakuan sewa PSAK 73 pada PT. AirAsia Indonesia Tbk sudah ideal, hal tersebut berdasarkan data perbandingan laporan posisi keuangan mulai tahun 2018, 2019, 2020 dan Kuartal III tahun 2021 yang diterbitkan oleh PT. AirAsia Indonesia Tbk, terdapat perubahan standar penerapan PSAK 73. Dimulai dengan Pada tanggal awal dimulainya suatu kontrak, Kelompok Usaha menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak mengandung sewa apabila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu (kurang dari atau sama dengan 12 bulan) untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Kelompok Usaha sebagai *lessee*, Kelompok Usaha mengakui aset hak-guna pada tanggal dimulainya sewa (yaitu tanggal aset tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada



harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung yang timbul di awal, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Kelompok Usaha sebagai *lessor*, Sewa dimana Kelompok Usaha tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sama halnya dengan pernyataan berikut PSAK 73 mewajibkan Indikator sewa operasi dimana Indikator sewa pembiayaan dibagi menjadi lebih mudah dimana persyaratan sewa operasi harus memenuhi semua kriteria, yaitu sewa aset jangka pendek (kurang dari atau sama dengan 12 bulan) dan bernilai rendah aktiva. Jika tidak memenuhi kedua kriteria tersebut, maka secara otomatis diakui sebagai sewa pembiayaan. ([Ahalik 2019](#))

Sedangkan disisi kinerja keuangan PT. AirAsia Indonesia Tbk mengalami penurunan jika dilihat dari DAR ditahun 2018, 2019, 2020 dan kuartal III tahun 2021 dengan jumlah masing-masing 1,28 kali, 0,92 kali, 1,47 kali, dan 1,84 kali. Semakin sedikit DAR maka semakin sedikit hutang yang digunakan perusahaan untuk memperoleh asset, dan rasio DAR yang sehat atau baik jika lebih kecil dari 1 x atau $<100\%$. Maka dapat disimpulkan kinerja keuangan PT. AirAsia Indonesia Tbk mengalami penurunan setelah menerapkan PSAK 73.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian [Prajanto \(2020\)](#) yang mengemukakan bahwa setelah diterapkannya PSAK 73 terjadi kenaikan rasio leverage yang diukur melalui Debt to Equity Ratio (DER) dan Debt to Aset Ratio (DAR) dikarenakan adanya pengungkapan aset hak guna dan liabilitas sewa pembiayaan pada laporan keuangan. [Susiani et al \(2021\)](#) Mengungkapkan bahwa terdapat perubahan jumlah asset dan jumlah kewajiban yang cukup signifikan, yang berdampak pada perubahan solvabilitas. rasio yang diperlihatkan dengan meningkatnya rasio DAR dan DER, sedangkan rasio profitabilitas PT X menurun rasio ROA dan meningkatnya rasio ROE. Secara keseluruhan bahwa industri jasa mengalami dampak yang sangat signifikan peningkatan rata-rata rasio solvabilitas dan penurunan rata-rata yang sangat signifikan rasio profitabilitas, diikuti oleh industri pertambangan dan manufaktur ([Safitri et, al. 2019](#))

KESIMPULAN

Pembentukan model pengakuan sewa PSAK 73 pada PT. Berlian Laju Tanker Tbk, PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT. AirAsia Indonesia Tbk sudah ideal, hal tersebut berdasarkan data perbandingan laporan posisi keuangan mulai tahun 2018, 2019, 2020 dan Kuartal III tahun 2021 yang diterbitkan oleh PT. Berlian Laju Tanker Tbk, terdapat perubahan standar dan penerapan PSAK 73. Sedangkan disisi kinerja keuangan PT. Berlian Laju Tanker Tbk jika dilihat dari Rasio Solvabilitas yakni DAR ditahun 2018, 2019, 2020 dan kuartal III tahun 2021 dengan jumlah masing-masing sebesar 0,59 kali, 0,54% kali, 0,57 kali, 0,52 kali. Semakin sedikit DAR maka semakin sedikit liabilitas yang digunakan perusahaan untuk memperoleh asset, dan rasio DAR yang sehat atau baik jika lebih kecil dari 1 kali. Maka dapat disimpulkan kinerja keuangan PT. Berlian Laju Tanker Tbk mengalami peningkatan setelah menerapkan PSAK 73. Selanjutnya kinerja keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengalami penurunan jika dilihat dari Rasio Solvabilitas yakni DAR ditahun 2018, 2019, 2020 dan kuartal III tahun 2021 dengan jumlah masing-masing 0,84 kali, 0,83 kali, 1,18 kali, 1,38 kali. Semakin sedikit DAR maka semakin sedikit hutang yang digunakan perusahaan untuk memperoleh asset, dan rasio DAR yang sehat atau baik jika lebih kecil dari 1 kali. Maka dapat disimpulkan kinerja keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengalami penurunan setelah menerapkan PSAK 73. Kemudian kinerja keuangan PT. AirAsia Indonesia Tbk mengalami penurunan jika dilihat dari Rasio Solvabilitas yakni DAR ditahun 2018, 2019, 2020



dan kuartal III tahun 2021 dengan jumlah masing-masing 1,28 kali, 0,92 kali, 1,47 kali, dan 1,84 kali. Semakin sedikit DAR maka semakin sedikit hutang yang digunakan perusahaan untuk memperoleh asset, dan rasio DAR yang sehat atau baik jika lebih kecil dari 1 kali. Maka dapat disimpulkan kinerja keuangan PT. AirAsia Indonesia Tbk mengalami penurunan setelah menerapkan PSAK 73.

SARAN

Penelitian Pembentukan model pengakuan sewa PSAK 73 yang ideal ini dapat memberikan informasi terkait pentingnya perusahaan jasa transaksi di Indonesia untuk membuat kebijakan dalam mengurangi risiko penerapan standar baru. Karena penerapan PSAK 73 ini berpotensi dapat meningkatkan liabilitas perusahaan dan munculnya akun baru yakni asset hak guna dan liabilitas sewa yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan di laporan posisi keuangan perusahaan. Hal ini dapat menjadi bahan bagi penelitian selanjutnya dengan melihat perusahaan dengan subsektor lain yang mempunyai proporsi sewa cukup signifikan, baik itu berdasarkan klasifikasi industri maupun berdasarkan proporsi dalam perusahaan masing-masing.

REFERENSI

- Ahalik, A. (2019). Perbandingan standar akuntansi sewa PSAK 30 sebelum dan sesudah adopsi IFRS serta PSAK 73. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 11(1), 169-178. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.17612>
- Branswijck, D., & Longueville, S. (2011). The financial impact of the proposed amendments to IAS 17: evidence from Belgium and the Netherlands. *Accounting and Management Information Systems*, 10(2), 275–294.
- Bintoro Yudho Sandi, Adam Wir, Amrie (2020), Implikasi Penerapan Dini PSAK 73 Tentang Sewa pada PT Unilever Indonesia TBK. Bunga Rampai, ISBN 978-623-93990.5-4.
- Bursa Efek Indonesia.2022. www.idx.co.id. Diakses 28 Februari 2022
- Erlinawati, I., & Mawardi, I. (2015). Pengaruh jumlah saham beredar, harga saham dan presentase saham publik terhadap likuiditas saham perusahaan yang listing di JII periode 2013. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2(2), 130-146.
- Hagar, A. A., & Djärv, T. (2015). Lease Accounting Modification: A qualitative study about how Swedish listed companies are preparing as well as adapting to the proposed amendments in IAS 17 Leases. Jönköping University: Thesis.
- Hartono, P. N., & Djawoto, D. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Go Public Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM)*, 7(3).
- Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277-1288.
- IAI (2017). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 73 Tentang Sewa. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Idrus, M. (2016). Penerapan PSAK No. 30 tentang akuntansi leasing aktiva tetap pada PT Bumi Sarana Beton. *Jurnal Ilmiah Bongaya*, 15, 129-152.
- Indah Rina, 2019. Analisis Kinerja Keuangan Studi Kasus Pada PT X Periode Tahun 2014 – 2016. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan* 3(4).
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2017). Intermediate accounting: IFRS edition. 3rd edition. New York: Wiley
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., Warfield, T. D., Wieck, I. M., & McConomy, B. J. (2019). Intermediate Accounting, Volume 2. John Wiley & Sons.
- Martani, Dwi., Siregar, Sylvia Veronica., Wardhani, Ratna., Farahmita, Aria., Tanujaya,



- Adward., dan Hidayat Taufik. (2016). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Martani, D. (2018). Akuntansi Keuangan Menengah II. Jakarta: Salemba Empat.
- Mashuri, A. A. A., & Ermaya, H. N. L. (2021). Penerapan standar akuntansi PSAK 73 leases terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. *Jurnal MONEX*, 10(1), 26-43.
- Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Oxtaviana, T. A., & Khusbandiyah, A. (2016). Pengaruh Aktiva Tetap, Hutang Jangka Panjang Dan Perputaran Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 14(1).
- Özeturk, M., & Serçemeli M. (2016). Impact of new standard “IFRS 16 leases” on statement of financial position and key ratios: a case study on an airline company in Turkey. *Business and Economics Research Journal*, 7(4), 143-158.
- Prajanto, A. (2020). Implementasi PSAK 73 atas sewa terhadap kinerja keuangan pada BUMN yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing)*, 1(2).
- Rosyid, A. (2017). Analisis Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, Firm Size Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah.).
- Rosyid, M. I. F., & Firmansyah, A. (2021). Implementasi PSAK 73 terkait sewa pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 26-37.
- Safitri, A., Lestari, U. P., & Nurhayati, I. (2019). Analisis dampak penerapan PSAK 73 atas sewa terhadap kinerja keuangan pada industri manufaktur, pertambangan dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 955-964.
- Sugiarto, G. A., & Dinarjito, A. (2022). Analisis Penerapan PSAK 73 Pada PT XYZ. *Jurnalku*, 2(2), 130-139.
- Susiani, R., Ramaputra, R. T., Ramdhani, R. F., & Adji, B. P. (2021). Implementation Of Psak 73 Leases and Its Impact on Company's Financial Performance (Case Study at Pt X Bandung). *Review of International Geographical Education Online*, 11(3), 1563-1570. <https://doi.org/10.35313/irwns.v10i1.1447>
- Sandi, Y. B., Sanjaya, A. W., & Firmansyah, A. (2020). Implikasi penerapan dini PSAK 73 tentang sewa (leases) pada PT Unilever Indonesia Tbk. *Bunga Rampai: Studi Kasus Akuntansi Keuangan*, 311-338.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). Research Methods for Business (7th Edition). West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
- Zhayyan, M. A. (2020). Dampak Implementasi PSAK 73 terhadap Laporan Keuangan dan rasio Keuangan pada Industri Jasa Penerbangan pada Tahun 2018 (Doctoral dissertation, STIE YKPN).

